

PRAKTIK MANAJEMEN KEUANGAN MASJID DAN POTENSI DANA MASJID

Zaenul Akhmad

Universitas Mataram
zaenulakhmad77@gmail.com

Nur Fitriyah

Universitas Mataram
nurfitriyah@unram.ac.id

Indria Puspitasari Lenap

Universitas Mataram
indrialenap@unram.ac.id

Diterima	: 29 Maret 2020
Direview	: 20 Mei 2020
Diterima	: 4 Juni 2020

Abstract

This research aims to find financial practice management and funds potential owned by mosque located at both roadside and settlement in Mataram. The problems faced by the mosque guard regarding those matters are the applying of PSAK 45 is not available toward mosque financial management, and many of them still have not exploited the potential of its funds. This study employs a descriptive qualitative approach. The results show that guards in both locations of the mosque have been managing the mosque financial and exploring its funds maximally, although the roadside mosque has a greater granting. Numerous strategies have been implementing by the mosque management team on excavating the fund potential to carry all the activities in the mosque such as, some use the Al Fatihah strategy, others use the dor to dor strategy, etc. The obstacles faced in the management of mosque finances and the potential for mosque funds are the financial part that has not been held by people who are competent in financial matters and also the absence of government involvement in mosque funding.

Keywords: Mosque financial management, potential funds mosque

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik manajemen keuangan dan potensi dana masjid yang dimiliki oleh masjid yang berada di pinggir jalan raya dan masjid yang berada di dalam pemukiman di Kota Mataram. Permasalahan yang dihadapi oleh pengurus masjid di kota Mataram mengenai praktik manajemen keuangan dan potensi dana yang dimiliki masjid adalah belum adanya penggunaan PSAK 45 dalam pengelolaan keuangan masjid dan masih banyak masjid yang belum bisa memanfaatkan dengan baik potensi dana yang dimilikinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengurus masjid baik yang berada di pinggir jalan raya maupun di dalam pemukiman telah melakukan manajemen keuangan masjid dan menggali potensi dana masjid secara maksimal walaupun masjid di pinggir jalan memiliki potensi dana yang lebih besar. Berbagai strategi diterapkan oleh pengurus masjid dalam menggali potensi dana untuk melaksanakan seluruh kegiatan di masjid ada yang menggunakan strategi menjual Al Fatimah, ada yang menggunakan strategi *door to door* dan lainnya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen keuangan masjid dan potensi dana masjid yaitu bagian keuangan yang belum dipegang oleh orang yang berkompetensi dalam hal keuangan dan juga tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam pendanaan masjid.

Kata Kunci: Manajemen keuangan masjid, potensi dana masjid

PENDAHULUAN

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba (Nordiawan, 2006). Selaku organisasi nirlaba masjid memiliki wewenang untuk mengelola dana yang bersumber dari pemerintah, perusahaan dan donatur (masyarakat). Masjid memperoleh sumber daya dari sumbangan dan pemberi sumbangan tidak mengharapkan imbalan, pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah yang telah dikeluarkan (Nordiawan, 2006 & Rini, 2018). Pengoptimalan fungsi masjid yang beragam tidak terlepas dari peranan pengurus masjid dan manajemen keuangannya yang kuat. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45

tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, bahwa organisasi nirlaba membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada para pemakai laporan.

Banyaknya sumber pendanaan yang membiayai aktivitas masjid berkaitan erat dengan besarnya dana yang dikelola oleh masjid. Dengan banyaknya jumlah dana yang disumbangkan ke masjid memerlukan manajemen keuangan yang baik dan sehat. Salah satu ciri manajemen keuangan yang baik dan sehat adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid. Masjid selaku salah satu organisasi nirlaba dituntut untuk mengelola uang dari masyarakat secara sistematis, transparan dan akuntabel. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid tercermin dari keberadaan laporan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel (Haq dan Dewi, 2013). Manajemen masjid yang baik ditopang dengan manajemen keuangan yang baik. Berbagai program yang direncanakan tidak dapat sesuai harapan jika tidak didukung dengan manajemen keuangan yang kuat dan sehat. Artinya, perlu adanya manajemen keuangan yang baik dan profesional. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sama saja pengurus masjid telah melalaikan amanah (Sochimim, 2015).

Sejalan dengan *Syariah Enterprise Theory* ini menjadi dasar keputusan suatu organisasi dalam bertindak untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya terkait dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu masjid dan masyarakat dengan memperhatikan hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Pertanggungjawabannya ini bukan hanya pada *stakeholders*, akan tetapi pertanggungjawabannya juga kepada juga kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim dan Allah sebagai *stakeholder* utamanya (Triyuwono, 2012). Selain sebagai penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi, laporan keuangan juga memiliki fungsi untuk

mengetahui potensi dana yang dimiliki masjid. Dengan banyaknya jumlah dan fungsi dari masjid maka tersimpan potensi dana yang cukup besar dari keberadaan masjid yang ada.

Penelitian tentang pengelolaan keuangan masjid dan potensi dana masjid telah banyak dilakukan antara lain oleh Rini (2018); Nurjannah (2018); Sari, M. et al., (2018); Bahrudin et al., (2017); Andarsari (2016); Haq dan Dewi (2013) yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masjid yang mempunyai laporan keuangan sesuai PSAK. Jenis laporan keuangan yang dibuat sebagian besar hanya laporan kas. Selain itu, hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran serta jumlah asset yang dimilikinya, seperti yang ditemukan dalam penelitian Fatih (2015). Namun, hasil penelitian Sari, M. et al., (2018), Nikita (2017) dan Hanafi (2015) yang menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Sudah sangat baik dan dalam praktiknya para pengurus tetap bertanggungjawab dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas.

Selain itu, terkait potensi dana masjid beberapa penelitian telah dilakukan, salah satunya oleh Suryanto dan Asep Saepulloh (2016), di mana jenis dana masjid yang diperoleh berupa dana sedekah, infak, zakat mal, dan wakaf. Adapun sumber dananya berasal dari sumbangan individu, bantuan pemerintah, usaha sendiri DKM, dan sumbangan dari organisasi serta perusahaan.

Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya serta fenomena filantropi Islam dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional dan transparan oleh masyarakat sipil, peneliti merasa bahwa penelitian mengenai praktik manajemen keuangan

masjid dan potensi dana masjid di Kota Mataram sangat penting. Mengingat di Kota Mataram merupakan pusat dari kegiatan di Pulau Lombok. Oleh karena itu, banyak pembangunan masjid di Kota Mataram semakin bertambah. Hal tersebut dapat kita buktikan jika bepergian di seluruh Kecamatan di Kota Mataram pasti tidak sulit untuk menemukan masjid, minimal setiap Lingkungan memiliki satu masjid baik itu berukuran kecil atau besar.

Penelitian ini hanya berfokus pada masjid yang lokasinya berada dipinggir jalan raya dan masjid yang berada didalam pemukiman di Kota Mataram. Peneliti melihat potensi dana masjid yang dimiliki oleh masjid yang lokasinya berada dipinggir jalan dan di dalam pemukiman sangat besar, tetapi belum bisa di optimalkan oleh pengurus masjid. Sehingga dapat dilihat pula berapa banyak masjid yang melaksanakan praktik manajemen keuangan masjid yang sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 dan bagaimana masjid mengelola potensi dana tersebut dengan berbagai keterbatasan dan kelebihan masing-masing masjid.

TELAAH LITERATUR

Pertanggungjawaban keuangan masjid seyogyanya disusun berdasarkan PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba yang di mana salah satunya tentang pengelolaan dana keuangan masjid yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan masjid yang baik. Dengan adanya PSAK 45 ini diharapkan pengurus masjid dapat mengelola keuangan masjid lebih baik lagi. Dari praktik manajemen keuangan dan pemanfaatan potensi dana ini perlu tanggung jawab besar dari pengurus masjid (*agent*) kepada para donatur (*Principial*) atau kepada masyarakat muslim sekitar dan yang paling utama kepada Allah Subhanahuwata'ala (*stakeholder*). Jika praktik manajemen keuangan di

masjid bisa dipertanggung jawabkan dengan baik maka masjid telah melakukan akuntabilitas dengan baik pula. Antara akuntabilitas dan transparansi ini bagaikan koin yang memiliki dua sisi. Jika akuntabilitas bisa dilakukan maka akan mudah untuk melakukan transparansi.

Akuntabilitas merupakan suatu tindakan atau cara pencatatan, pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan masjid yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan transparansi akan terwujud jika semua informasi dapat diakses oleh siapa saja bukan hanya untuk pengurus masjid saja. Seluruh informasi terkait dengan masjid harus terbuka untuk semua orang seperti informasi tentang anggaran dana masjid digunakan untuk apa saja, sumber pendanaan masjid didapat dari mana, dan laporan keuangan masjid harus dipublikasikan kepada seluruh masyarakat. Jika akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan dengan baik maka mudah untuk menggali potensi dana yang dimiliki oleh masjid. Potensi dana disini merupakan sumber dana yang belum dimiliki oleh masjid tetapi dapat menjadi sumber dana untuk masjid dalam membiayai segala kegiatan atau aktivitas di masjid jika masjid memiliki inovasi dalam mencari sumber dana.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2018); Nurjannah (2018); Sari, M. et al., (2018); Bahrudin et al., (2017); Andarsari (2016); Haq dan Dewi (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masjid yang mempunyai laporan keuangan sesuai PSAK. Jenis laporan keuangan yang dibuat sebagian besar hanya laporan kas. Selain itu, hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran serta jumlah asset yang dimilikinya, seperti yang ditemukan dalam penelitian Fatih (2015). Pada organisasi nirlaba seperti masjid masih sedikit yang melakukan pencatatan dengan lengkap atas laporan keuangannya. Masih banyak masjid yang belum secara konsisten melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi tidak

sedikit juga masjid-masjid besar di berbagai provinsi di Indonesia yang telah melakukan pencatatan keuangan dengan baik.

Namun yang menarik, hasil penelitian Sari, M. et al., (2018) menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid terdapat nilai-nilai spiritualitas, seperti: kejujuran, adil, dan tanggungjawab yang mempengaruhi adanya praktik akuntabilitas dalam masjid, baik dalam pengelolaan keuangan ataupun dalam hal memakmurkan masjid. Hal yang sama ditemukan oleh Nikita (2017) dan Hanafi (2015) yang menunjukkan bahwa nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid sudah sangat baik dan dalam praktiknya para pengurus tetap bertanggungjawab dengan apa yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal penyampaian pencatatannya. Selain itu, aturan hukum dari ajaran islam harus menjadi dasar standar dalam menjalankan akuntabilitas.

Selain itu, terkait potensi dana mesjid penelitian dilakukan oleh Suryanto dan Saepulloh (2016), di mana jenis dana masjid yang diperoleh berupa dana sedekah, infak, zakat mal, dan wakaf. Adapun sumber dananya berasal dari sumbangan individu, bantuan pemerintah, usaha sendiri DKM, dan sumbangan dari organisasi serta perusahaan. Di samping itu ada masjid yang sudah memiliki baitul mal masjid meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Potensi kegiatan masjid yang dapat mendukung untuk pemberdayaan ekonomi masjid adalah pengalaman DKM masjid dalam peneglolaan zakat fitrah dan kegiatan rutin majlis taklim baik dalam bentuk kelompok pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan kelompok pengajian remaja serta pemuda masjid.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan yang dilakukan penulis adalah wawancara dengan narasumber dan meminta data keuangan, yaitu laporan keuangan masjid, dan data non keuangan masjid yaitu laporan kegiatan serta laporan masjid lainnya. Dalam penelitian ini ada beberapa informan, yaitu: Ketua pengurus masjid, Sekretaris, Bendahara. Dengan jumlah informan total sebanyak 12 orang. Lokasi penelitian ini berada pada masjid-masjid yang berlokasi di pinggir jalan dan di dalam pemukiman di Kota Mataram, dengan sampel sebagai berikut ; Masjid Nurul Yaqin (Kecamatan Selaparang), Masjid Jami' Baitul Amin (Kecamatan Ampenan), Masjid Nurul Hidayah (Kecamatan Cakranegara), Masjid At-Taqwa (Kecamatan Mataram). Proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Praktik Manajemen Keuangan

Tabel 4.1

Proses Penganggaran secara umum oleh masjid dipinggir jalan raya dan masjid didalam pemukiman di Kota Mataram

Penganggaran Secara Umum							
No	Nama Masjid	Rencana Strategis (Visi-Misi-Tujuan)	Perencanaan Operasional		Program/ Aktivitas	Laporan Kegiatan dan Evaluasi	Metode Anggaran
			Konsep	Moneter / Rutin/ Kegiatan			
Masjid Yang Berada Di Pinggir Jalan Raya							
1.	Masjid Nurul /Yaqin	√	√	√	√	√	Tradisional
2	Masjid Jami' Baitul Amin	√	√	√	√	√	Tradisional
Masjid Yang Berada Di Dalam Pemukiman							
3	Masjid At-Taqwa	√	√	√	√	-	Tradisional
4	Masjid Nurul Hidayah	√	√	√	√	-	Tradisional
Kesamaan Proses Penganggaran		Setiap masjid telah memiliki anggaran dalam melaksanakan kegiatannya. Setiap program yang dicanangkan masjid telah melalui proses perencanaan terlebih dahulu.					

Sumber : (data primer diolah, 2019)

Setiap masjid dalam penelitian ini telah memiliki visi, misi dan tujuan meskipun visi, misi dan tujuan masjid yang dimiliki bukan secara tertulis hanya dalam bentuk abstrak atau pemikiran saja. Akan tetapi walaupun begitu pengurus masjid tetap semangat dalam menjalankan suatu kegiatan demi mewujudkan visi, misi dan tujuan masjidnya.

Sumber Penerimaan Masjid

Tabel 4.2

Sumber Penerimaan masjid							
No	Nama Masjid	Sedekah/ Infak	Zakat	Usaha Mandiri	Sumbangan Pemerintah	Sumbangan Instansi Swasta	Kotak Amal
Masjid Yang Berada Di Pinggir Jalan Raya							
1.	Masjid Nurul Yaqin	√	-	-	-	-	√
2.	Masjid Jami' Baitul Amin	√	-	√	√	-	√
Masjid Yang Berada Di Dalam Pemukiman							
3.	Masjid At-Taqwa	√	√	-	-	-	√
4.	Masjid Nurul Hidayah	√	-	-	-	-	√

Sumber Penerimaan Masjid

Sumber : (data primer diolah, 2019)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa secara umum sumber utama pemasukan masjid bersumber dari sedekah, infak dan kotak amal masjid. Dalam penelitian ini hanya Masjid At Taqwa yang memiliki unit pengumpul zakat sebagai badan yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat khususnya zakat fitrah. Pada umumnya dana yang terkumpul dari sedekah, infak dan kotak amal digunakan untuk membiayai kegiatan

sehari-harinya yang bersifat rutin, seperti biaya listrik, air, pengajian tiap minggu dll.

Laporan Keuangan Masjid

Tabel 4.3
Praktik Pelaporan Keuangan Masjid

No	Nama Masjid	Model Pencatatan Yang Digunakan	Basis Akuntansi	Penggunaan PSAK 45	Laporan Keuangan Yang Diaudit
Masjid Yang Berada Di Pinggir Jalan Raya					
1.	Masjid Nurul Yaqin	<i>Single Entry</i>	Kas	Tidak	Tidak
2.	Masjid Jami' Baitul Amin	<i>Single Entry</i>	Kas	Tidak	Tidak
Masjid Yang Berada Di Dalam Pemukiman					
3.	Masjid At-Taqwa	<i>Single Entry</i>	Kas	Tidak	Tidak
4.	Masjid Nurul Hidayah	<i>Single Entry</i>	Kas	Tidak	Tidak

Sumber : (data primer diolah, 2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa praktik pelaporan keuangan yang dilakukan oleh masjid yang berada dipinggir jalan raya maupun masjid yang berada didalam pemukiman sama-sama menggunakan sistem *single entry* dan menggunakan basis kas dalam pencatatannya. Laporan keuangan yang dibuat belum mengacu pada PSAK 45. Bentuk laporan keuangan yang dihasilkan hanya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran saja. Dalam praktik akuntansi laporan yang dihasilkan oleh masjid dalam sampel penelitian ini bukanlah laporan keuangan melainkan buku kas saja.

Tabel 4.4
Praktik Pelaporan Keuangan Masjid Lainnya

No.	Nama Masjid	Penggunaan <i>Software</i> Akuntansi	Bentuk Laporan Yang Dihasilkan
Masjid Yang Berada Di Pinggir Jalan Raya			
1.	Masjid Nurul Yaqin	Belum menggunakan <i>software</i> akuntansi khusus	Laporan penerimaan dan pengeluaran
2.	Masjid Jami' Baitul Amin	Belum menggunakan <i>software</i> akuntansi khusus	Laporan penerimaan dan pengeluaran
Masjid Yang Berada Di Dalam Pemukiman			
3.	Masjid At Taqwa	Belum menggunakan <i>software</i> akuntansi khusus	Laporan penerimaan dan pengeluaran
4.	Masjid Nurul Hidayah	Belum menggunakan <i>software</i> akuntansi khusus	Laporan penerimaan dan pengeluaran

Sumber : (data primer diolah, 2019)

Dalam pembuatan laporan keuangan masih bersifat manual dan belum pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Penggunaan bukti transaksi hanya digunakan dalam hal seperti pengadaan barang, tetapi selain kegiatan pengadaan seperti honor penceramah, gaji tukang reparasi dan kegiatan seperti itu tidak menggunakan bukti transaksi. Seluruh masjid juga sekarang telah memiliki rekening di bank yang digunakan untuk menyimpan uang kas masjid dan keperluan lainnya dengan atas nama lembaga masjid bukan atas nama pengurus masjid. Selain itu juga Masjid Jami' Baitul Amin menggunakan rekening bank untuk pencairan dana dari bapak Walikota Mataram dan juga sumbangan dari pihak lainnya.

Praktik Akuntabilitas dan Transparansi Masjid

Pada umumnya masjid telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Praktik akuntabilitas dan transparansi tercermin dari kegiatan masjid untuk memberitahukan laporan penerimaan dan pengeluaran masjid kepada jamaah melalui laporan lisan saat sebelum shalat jumat dimulai. Selain itu juga masjid jami' baitul amin juga memberitahukan penerimaan, pengeluaran dan kas masjid menggunakan media papan tulis yang tersedia di masjid.

Praktik akuntabilitas dan transparansi ini juga tercermin pada kemudahan bagi siapa saja yang ingin mengetahui atau membutuhkan informasi tentang masjid baik itu masjid yang berada di pinggir jalan raya maupun masjid yang berada di dalam pemukiman. Tetapi dari segi pendokumentasian kegiatan masjid di pinggir jalan raya lebih tertata dengan rapi, karena pengurus masjid di bantu oleh remaja masjid mendokumentasikan kegiatan mereka dan kemudian seluruh kegiatan yang dilakukan di posting ke media sosial sehingga seluruh masyarakat menjadi mengetahui kemana aliran dana yang dari masyarakat digunakan.

Sedangkan masjid yang berada di dalam pemukiman hanya mendokumentasikan saja tetapi tidak diposting ke media sosial agar seluruh masyarakat mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh masjid. Dan juga belum adanya papan informasi yang miliki masjid sebagai sarana publikasi informasi keuangan maupun kegiatan masjid.

Potensi Dana Masjid

Tabel 4.5
Penerimaan Masjid Per Bulan

No	Nama Masjid	Tipe Donasi Per Bulan (Dalam Rupiah)			Total
		Zakat	Kotak Amal, infak dan sedekah	Lainnya	
Masjid Yang Berada Di Pinggir Jalan Raya					
1.	Masjid Nurul Yaqin	-	8.540.000	-	8.540.000
2.	Masjid Jami' Baitul Amin	-	7.984.000	-	7.984.000
Total		-	16.524.000	-	16.524.000
Masjid Yang Berada Di Dalam Pemukiman					
3.	Masjid At Taqwa	-	3.193.000	-	3.193.000
4.	Masjid Nurul Hidayah	-	3.566.000	-	3.566.000
Total		-	6.759.000	-	6.759.000

Sumber : (data primer diolah, 2019)

Dari tabel diatas total penerimaan per bulan masjid di pinggir jalan raya sebesar Rp. 16.524.000 lebih banyak dibandingkan dengan total penerimaan per bulan masjid yang berada di dalam pemukiman sebesar Rp. 6.759.000, karena masjid di pinggir jalan raya memiliki peluang mendapatkan pemasukan lebih banyak dari pada masjid yang berada di dalam pemukiman dikarenakan faktor lokasi.

Masjid yang berada di pinggir jalan raya lebih sering disinggahi oleh masyarakat luas yang hanya singgah shalat atau sekedar beristirahat sebentar karena telah menempuh perjalanan jauh. Sedangkan masjid di dalam pemukiman jarang ada masyarakat luar yang singgah untuk shalat, jadi yang menjadi pengisi kotak amal, infaq dan sedekah hanya masyarakat yang

bermukim disana saja jarang ada masyarakat luar yang beramal, berinfaq dan bersedekah disana.

Tabel 4.6
Pengeluaran Masjid Per Bulan

No.	Nama Masjid	Pengeluaran Masjid Per Bulan
Masjid Yang Berada Di Pinggir Jalan Raya		
1.	Masjid Nurul Yaqin	Rp. 3.571.000
2.	Masjid Jami' Baitul Amin	Rp. 6.035.000
	Total	Rp. 9.606.000
Masjid Yang Berada Di Dalam Pemukiman		
3.	Masjid At Taqwa	Rp. 533.000
4.	Masjid Nurul Hidayah	Rp. 879.000
	Total	Rp. 1.412.000

Sumber : (data primer diolah, 2019)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa total pengeluaran per bulan masjid yang berada di pinggir jalan raya sebesar Rp. 9.606.000 lebih besar dari bandingkan dengan total pengeluaran per bulan masjid yang berada di dalam pemukiman sebesar Rp. Rp. 1.412.000. Pengeluaran masjid dalam peneltian ini kebanyakan digunakan untuk membayar tagihan listrik masjid, air PDAM masjid, membayar gaji merbot dan membeli peralatan kebersihan untuk pemeliharaan masjid.

Total pengeluaran perbulan masjid lebih rendah dari pada total penerimaan masjid. Tetapi jika masjid yang berada di dalam pemukiman mengadakan renovasi dan acara tahunan rutin maka pengeluaran masjid akan lebih besar penerimaan masjid. Untuk meminimalisir pengeluaran maka pengerus masjid yang berada di dalam pemukiman akan meminta masyarakat untuk membantu mensukseskan acara tersebut baik dengan uang atau

dengan memberi makanan untuk tamu undangan. Cara tersebut ampuh dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran dan masyarakat sangat senang jika masjid melaksanakan acara tersebut.

Masih banyak potensi dana masjid yang belum bisa digali oleh masjid. Seperti halnya membuat TPQ (Taman Pengajian Qur'an), membuat group hadroh, dan juga pelatihan dalam pemanfaatan limbah rumah tangga bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pengurus masjid sebagai sumber penerimaan lain agar kegiatan masjid dapat lebih hidup lagi dan memiliki pemasukan lain selain dari kotak amal masjid, infak dan sedekah dari masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mendukung *Agency Theory* dan *Syariah Enterprise Theory*. Dalam *Agency Theory* pelaksanaan kegiatannya yaitu masyarakat bertidak sebagai donatur yang mendonasikan uangnya kepada pengurus masjid untuk dikelola dengan baik. Hal tersebut memiliki pengaruh dalam akuntabilitas dana masjid dan pencegahan penyalahgunaan dana masjid oleh pengurus masjid. Sedangkan pengurus masjid selaku *agent* bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang terbukti dengan pengelolaan keuangan masjid dan juga berbagai acara yang dilaksanakan di masjid.

Syariah Enterprise Theory menganggap bahwa seluruh sumber daya yang ada di masjid digunakan untuk kepentingan masyarakat tetapi tetap memperhatikan syariat-syariat islam dalam menjalankan suatu kegiatan. Dalam menjaga amanah dari masyarakat dan juga Allah, pengurus masjid membuat acara atau kegiatan baik rutin setiap minggunya ataupun setiap tahunnya, membuat laporan keuangan, menyimpan bukti transaksi, mengumumkan keadaan kas masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari

pengurus masjid kepada masyarakat dan juga Allah. Semua kegiatan yang dilakukan oleh pengurus masjid demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan pengurus masjid dan masyarakat kepada pemilik segala sumber daya yang ada yaitu Allah dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah islam dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berpedoman pada kitab suci umat Islam yaitu Al Quran.

Dalam hal pengelolaan keuangan masjid telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nurjannah (2018), Rini (2018), Andarsari (2016), Hanafi (2015), Haq dan Dewi (2013). Bahwa pengelolaan keuangan yang digunakan oleh masjid masih menggunakan cara yang sederhana. Pencatatan laporan keuangan masjid hanya sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Metode pencatatan masih menggunakan *single entry* dan menggunakan basis kas. Secara keseluruhan masjid yang menjadi sampel dalam penelitian ini belum membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45. Terkait dengan PSAK 45, seluruh masjid yang menjadi sampel penelitian ini mengaku belum pernah mendengar dan diperkenalkan pada pengurus masjid.

Selain itu juga baik masjid yang berada di pinggir jalan raya maupun masjid yang berada di dalam pemukiman telah mampu melakukan pemisahan fungsi yang tegas dalam pengelolaan keuangan dan pengarsipan bukti-bukti transaksi keuangan masjid ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nikita (2017). Walaupun pengurus masjid yang memegang tugas dalam bidang keuangan tidak memiliki kompetensi dalam bidang keuangan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sari et al., (2018). Tetapi meski seperti itu pengurus masjid tetap menjaga amanah dan semangat dalam menjalankan tugasnya.

Sumber penerimaan utama dari masjid yang menjadi sampel penelitian ini berasal dari kotak amal, infak dan sedekah masyarakat saja ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan Rini (2018), Bahrudin et al., (2017), Suryanto dan Saepulloh (2016). Sebagian besar masjid kota Mataram hanya bergantung dari kotak amal, infak dan sedekah masyarakat karena belum adanya sumber dana lain yang dimiliki oleh masjid hanya beberapa masjid saja yang mempunyai sumber dana lain seperti pemberian jasa penitipan barang, penyewaan terop, penyewaan ruangan masjid dll.

Akuntabilitas dan transparansi kegiatan dan keuangan masjid telah dilaksanakan dengan baik oleh masjid yang berada di pinggir jalan raya maupun masjid di dalam pemukiman. Pengurus masjid telah mengelola keuangan masjid dengan akuntabel dan transparan terbukti dengan berbagi kegiatan telah dilaksanakan oleh masjid dan juga pengurus masjid telah melaporkan berbagai kegiatan dan keadaan keuangan yang dimiliki oleh masjid setiapbulannya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nikita (2017), Bahrudin (2017), Hanafi (2015), Haq dan Dewi (2013), Yulianti (2010).

Potensi dana masjid dapat dilihat dari penerimaan masjid yang lebih besar dari pengeluaran masjid, jika dikelola dengan baik potensi dana ini akan dapat memecah seluruh permasalahan yang ada dimasyarakat sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial di masyarakat ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Haq dan Dewi (2013). Tetapi potensi dana yang dimiliki masjid yang berada di pinggir jalan raya lebih besar daripada potensi dana yang dimiliki masjid yang berada di dalam pemukiman yang menjadi sampel penelitian ini karena sumber penerimaan masjid yang lebih luas dan juga lokasi masjid yang strategis.

SIMPULAN

Masjid yang berada di pinggir jalan maupun yang berada di dalam pemukiman di Kota Mataram memiliki kesamaan dalam sumber utama penerimaan yaitu bersumber dari kotak amal, infak dan sedekah dari jamaah atau masyarakat dan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Praktik pelaporan keuangan masjid yang dilakukan oleh masjid yang berada di pinggir jalan maupun di dalam pemukiman di Kota Mataram pada umumnya menganut sistem *single entry* dan menggunakan basis kas dalam pencatatannya. Laporan keuangan yang dibuat belum mengacu pada PSAK 45 dan belum pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Bentuk laporan keuangan yang dihasilkan hanya berupa laporan pemasukan dan pengeluaran saja. Potensi dana yang dimiliki masjid, masjid yang berada di pinggir jalan raya memiliki potensi dana yang lebih besar dibandingkan dengan masjid yang berada di dalam pemukiman. Dibuktikan dengan penerimaan masjid di pinggir jalan raya sangat besar dibandingkan dengan pengelurannya ditambah lagi dengan keunggulan lokasi masjid yang sering disinggahi oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Andarsari, P. R. 2016. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 1(2): 143-152.
- Bahrudin, et al., . 2017. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa AirKuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi*, 8(2): 1.

- Fatih, M. 2015. Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Yayasan Berdasarkan PSAK 45 (Studi Kasus Pada Yayasan Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi*. 1(2): 11-8.
- Hanafi, R. 2015. *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid Melalui Pendekatatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Nurusy Syifa' Surakarta)*. [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Haq, J. A. A. & Dewi, M. K. 2013. *Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor)*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Jensen M. C. & Meckling, W. H. 1976. *Theory of the Firm Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Harvard of Business School.
- Nikita, D.P. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Mataram*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram: Mataram.
- Nurjannah. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf)*. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar.
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rini, R. 2018. Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, .6(2): 1-5.
- Sari, M., Fitria, Y. & Mintarti, S. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal Akuntansi*. 15(2): 1-4.
- Sochimim. 2015. *Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kota Purwokerto*. [Laporan Penelitian]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2015.
- Suryanto, A & Saepulloh, A. 2016. Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya. *Iqtishoduna*, 8(2).
- Triyuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yulianti, R. T. 2010. Transparansi Anggaran : Suatu Upaya Efisiensi dan Antisipasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. IV, 239-250.